Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

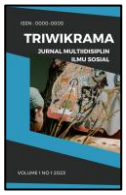

ANALISIS PROGRAM GAMPANG SEMBAKO DI KOTA TANGERANG DALAM PERSPEKTIF DYNAMIC GOVERNANCE

Lathifah Az Zahra[1], Vhinkan Yolandini[2], Silva Nuraidah[3]
Program Studi Administrasi Publik, Universitas Islam Syekh Yusuf

ARTICLE INFO

Article history:
Received Juli 2026
Revised Juli 2026
Accepted Juli 2026
Available Juli 2026

E-mail Korespondensi:
Zahraaifah13@gmail.com

This is an open access article under the CC BY-SA license. Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa

ABSTRAK

Kota Tangerang menghadapi tantangan struktural sebagai kota konsumen pangan yang sangat bergantung pada pasokan dari luar daerah, seiring penyusutan luas panen padi dari 436 hektare (2024) menjadi 164 hektare (2025) menurut data resmi BPS Provinsi Banten. Sebagai respons, Pemerintah Kota Tangerang mengimplementasikan Program Gampang Sembako melalui strategi 4K dengan pendekatan hulu-hilir. Penelitian ini bertujuan menganalisis governance capability Pemerintah Kota Tangerang dalam melaksanakan program tersebut menggunakan kerangka Dynamic Governance dari Neo dan Chen (2007). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus, melalui wawancara dengan Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Tangerang serta observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah mengembangkan kemampuan antisipasi kebijakan melalui early warning system dan SIHARTAPASTI, meski masih terkendala skema kerja sama business-to-business yang tidak mengikat. Kolaborasi lintas sektor turut terwujud melalui keterlibatan DKP, Disperindag, Bulog, dan TNI/Polri, dengan capaian penyaluran bantuan kepada 3.747 keluarga penerima manfaat. Kemampuan evaluasi dan penyesuaian kebijakan tampak dari peninjauan berkelanjutan terhadap keterbatasan infrastruktur logistik dan penyusunan Kajian Perencanaan Ketahanan Pangan 2025–2029 oleh Bappeda. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kerja sama antardaerah berbasis government-to-government, pembangunan infrastruktur logistik permanen, serta diversifikasi pembiayaan program untuk mendukung keberlanjutan ketahanan pangan Kota Tangerang.

Kata kunci: *Dynamic Governance, Gampang Sembako, ketahanan pangan, tata kelola pemerintah daerah, Kota Tangerang*

PENDAHULUAN

Kota Tangerang dengan luas wilayah 164,55 km^2 dan jumlah penduduk mencapai 1,9 juta jiwa menghadapi permasalahan struktural sebagai kota konsumen yang bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah. Pada tahun 2025 terjadi peningkatan harga kebutuhan pokok yang tercermin dari kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 106,46 pada Desember 2024 menjadi 109,18 pada Desember 2025. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi tertinggi sebesar 1,20%, dengan komoditas utama berupa cabai merah, cabai rawit, telur ayam ras, bawang merah, beras, daging ayam ras, dan daging sapi. Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, Pemerintah Kota Tangerang mengimplementasikan Gerakan Sembako (Gerakan Aman Pasokan dan Harga Sembako)

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

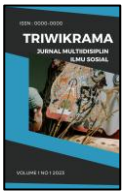

sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus melindungi daya beli masyarakat. Program ini menjadi bagian dari visi pembangunan daerah melalui konsep 3G (Gampang Sekolah, Gampang Kerja, dan Gampang Sembako) serta telah terintegrasi dalam Renja dan RKPD Tahun 2025. Dari segi struktur hukum, pengawasan pangan Kota Tangerang dilakukan melalui kolaborasi antar instansi Pemerintah Daerah seperti Dinas Perdagangan, Satgas Pangan, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Bulog, serta TNI/Polri dan organisasi lainnya.

Struktur kelembagaan ini membentuk jaringan pengawasan yang memungkinkan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok di pasar tradisional secara berkala. Untuk mencegah lonjakan harga dan kemungkinan penimbunan, pemerintah membentuk tim terpadu lintas sektor untuk melakukan inspeksi dan operasi pasar secara tepat, terutama menjelang hari besar keagamaan. Implementasi program dilakukan melalui strategi 4K (ketersediaan, keterjangkauan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif) dengan pendekatan hulu–hilir yang terintegrasi. Pada sisi hulu, pemerintah memperkuat ketersediaan pasokan melalui pengembangan urban farming, kolaborasi dengan Kelompok Wanita Tani (KWT), serta pemberian bantuan sarana produksi yang didukung APBD Tahun 2025. Pada sisi hilir, stabilisasi harga diperkuat melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di 162 lokasi hingga Desember 2025 dengan melibatkan Bulog Cabang Tangerang, Perumda Pasar, pelaku usaha pangan, serta dukungan pembiayaan dari APBD, APBN, dan APBD Provinsi.

Ketersediaan pangan mencakup bahan pangan secara fisik dalam jumlah dan variasi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi setiap orang dan masyarakat. Produksi pangan, impor, dan cadangan pangan merupakan bagian dari ketersediaan pangan (Nuhfil Hanani, 2023). Namun demikian, tantangan ketahanan pangan Kota Tangerang tercermin dari penyusutan luas panen padi, yang menurut data resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Banten turun dari 436 hektare pada 2024 menjadi hanya 164 hektare pada 2025, atau menyusut 62,27 persen hanya dalam satu tahun (Statistik & Banten, 2026). Penyusutan ini tidak terlepas dari masifnya alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman dan industri (Rantau et al., 2024). Sejalan dengan itu, produksi padi Kota Tangerang turun dari 2.708 ton gabah kering giling (GKG) pada 2024 menjadi 1.025 ton GKG pada 2025. Produksi berasnya juga turun dari 1.542 ton menjadi 584 ton pada periode yang sama. Di sisi lain, kebutuhan beras masyarakat Kota Tangerang diperkirakan mencapai 180.809 ton per tahun, sehingga produksi lokal hanya mampu memenuhi kurang dari satu persen dari kebutuhan tersebut. Ketimpangan ini menunjukkan tingginya ketergantungan terhadap pasokan luar daerah yang rentan terhadap fluktuasi harga akibat gangguan distribusi, faktor musim, maupun dinamika pasokan nasional.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

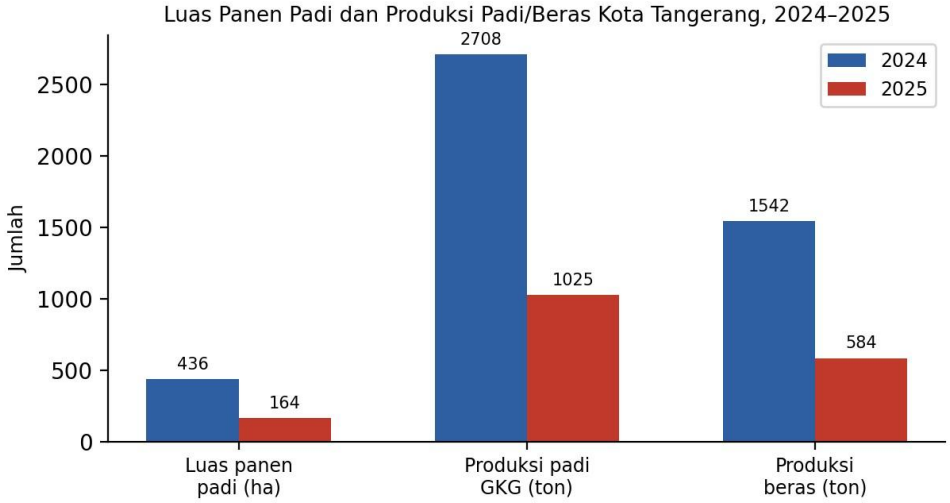

Gambar 1. Luas Panen Padi dan Produksi Padi/Beras Kota Tangerang, 2024-2025 (BPS Provinsi Banten, 2026)

Dalam implementasinya, Gerakan Sembako masih menghadapi berbagai tantangan, seperti stabilitas harga, ketepatan distribusi, ketepatan sasaran penerima, serta efektivitas koordinasi dan keberlanjutan pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada desain kebijakan, tetapi juga pada kemampuan tata kelola pemerintah dalam mengelola sumber daya dan memastikan implementasi berjalan efektif.

Sejalan dengan hal tersebut, konsep Dynamic Governance dari Neo dan Chen (2007) relevan digunakan. Konsep ini menekankan kemampuan pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan secara dinamis terhadap perubahan lingkungan demi mencapai tujuan jangka panjang. Neo dan Chen (2007) membangun dynamic governance di atas dua elemen fondasi, yaitu culture dan capabilities, yang didukung oleh able people (SDM yang kompeten) dan agile processes (proses birokrasi yang lincah dan adaptif). Dari sisi culture, tercermin tiga kapabilitas berpikir utama, yaitu think ahead (antisipasi masa depan), think again (evaluasi dan penyesuaian kebijakan), dan think across (pembelajaran lintas sektor atau wilayah) (Fajri et al., 2020). Penelitian ini secara khusus menyoroti ketiga kapabilitas berpikir tersebut dalam pelaksanaan Program Gampang Sembako. Think ahead terlihat dari upaya mengantisipasi lonjakan harga pangan, think again dari evaluasi strategi distribusi, dan think across dari kolaborasi lintas sektor seperti dengan Bulog, Perumda Pasar, dan Kelompok Wanita Tani.

Selain tiga kapabilitas berpikir tersebut, Neo dan Chen (2007) menekankan bahwa dynamic governance hanya dapat terwujud bila ditopang oleh tiga elemen fondasi lain, yaitu culture, able people, dan agile processes, yang menjadi prasyarat agar kapabilitas berpikir dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata di lapangan. Culture merupakan nilai dan norma yang tertanam dalam organisasi pemerintah, yang mendorong aparatur terbiasa berpikir antisipatif, reflektif, dan terbuka terhadap pembelajaran lintas sektor. Dalam konteks Program Gampang Sembako, budaya ini tercermin dari inisiatif DKP Kota Tangerang membangun early warning system dan mengembangkan SIHARTAPASTI secara mandiri, alih-alih hanya menunggu arahan dari pemerintah provinsi atau pusat.

Able People merujuk pada sumber daya manusia aparatur yang kompeten, cerdas, dan tanggap (agile) dalam membaca perubahan lingkungan. Kapasitas ini terlihat dari kemampuan petugas DKP dan Disperindag memantau harga secara terdiferensiasi antara pasar tradisional dan ritel modern, serta merespons cepat lonjakan permintaan menjelang hari besar

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

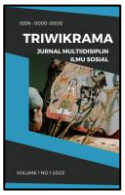

keagamaan melalui pembatasan pembelian dan operasi pasar. Agile Processes adalah proses dan mekanisme birokrasi yang lincah dan tidak kaku, sehingga organisasi mampu merespons perubahan tanpa terhambat prosedur yang berbelit. Hal ini tampak dari fleksibilitas pemerintah dalam melibatkan multi-aktor secara cepat, mulai dari Bulog, Perumda Pasar, KWT, hingga TNI/Polri, serta pemanfaatan skema pembiayaan lintas sumber (APBD, APBN, APBD Provinsi) untuk menjaga keberlanjutan Gerakan Pangan Murah.

Ketiga elemen ini saling menopang: culture membentuk pola pikir antisipatif aparatur, able people menyediakan kapasitas individu untuk membaca dan merespons perubahan, sedangkan agile processes memastikan struktur organisasi cukup lentur untuk mengeksekusinya. Namun demikian, sebagaimana akan diuraikan pada bagian hasil dan pembahasan, ketiga elemen ini di Kota Tangerang masih bersifat adaptif dan belum sepenuhnya terlembagakan, terutama pada skema kerja sama pengadaan pangan yang masih business-to-business dan belum mengikat secara kelembagaan.

RUMUSAN MASALAH

Berangkat dari perspektif dynamic governance, penelitian ini berfokus pada bagaimana Pemerintah Kota Tangerang menerapkan kemampuan think ahead, think again, dan think across dalam pelaksanaan Program Gampang Sembako. Kemampuan think ahead tercermin dalam upaya pemerintah mengantisipasi kebutuhan dan potensi gejolak harga pangan di masa depan, think again terlihat dari proses evaluasi serta penyesuaian kebijakan yang dilakukan secara berkelanjutan, sedangkan think across tampak melalui kolaborasi lintas sektor dan pemangku kepentingan dalam mendukung keberhasilan program.

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam governance capability Pemerintah Kota Tangerang dalam mengimplementasikan Program Gampang Sembako Tahun 2025. Secara lebih spesifik, penelitian ini berupaya menganalisis kemampuan pemerintah dalam menerapkan aspek think ahead, think again, dan think across dalam pelaksanaan program, serta menilai sejauh mana implementasi tersebut mampu menjaga stabilitas harga dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus, berlokasi di Kota Tangerang dengan melibatkan informan dari Dinas Ketahanan Pangan, INDAKOPUKM, BULOG, pelaksana teknis, dan masyarakat penerima manfaat yang ditentukan melalui teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña dengan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, dan member check. Kerangka analisis yang digunakan adalah konsep dynamic governance (Neo & Chen) yang mencakup thinking ahead, thinking again, dan thinking across.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Volatilitas harga pangan merupakan salah satu tantangan utama sistem pertanian global saat ini, sebagaimana tergambar dalam krisis pangan 2007–2009 ketika lonjakan harga terjadi pada komoditas pokok seperti gandum, beras, jagung, dan kedelai. Dalam konteks ini, kemampuan pemerintah daerah untuk mengantisipasi tekanan harga sebelum terjadi, bukan hanya merespons setelah krisis berlangsung, menjadi krusial. Berbagai reaksi pemerintah di

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

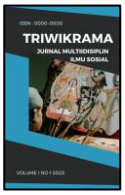

negara-negara yang mengalami guncangan harga pangan serupa memberikan pembelajaran berharga mengenai respons terhadap volatilitas harga, khususnya dalam ekonomi politik pembuatan kebijakan pertanian (Gouel, 2015). Risiko gejolak harga pangan yang ekstrem bahkan dapat memperburuk ketidakstabilan sosial dan politik, terutama di kawasan perkotaan yang rentan terhadap aksi kolektif, sehingga antisipasi kebijakan menjadi elemen kritis dalam tata kelola pemerintahan daerah (Kalkuhl & Braun, 2016). Kapasitas antisipasi kebijakan di Kota Tangerang sangat ditentukan oleh kondisi strukturalnya sebagai daerah bukan penghasil pangan. Luas panen padi yang tersisa hanya sekitar 164 hektare pada 2025, turun tajam dari 436 hektare pada 2024, sehingga produksi beras lokal jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sepanjang tahun (Statistik & Banten, 2026)

Kondisi ini menjadikan antisipasi kebijakan bukan sekadar pilihan, melainkan keharusan struktural. Kondisi struktural ini turut dikonfirmasi oleh data terbaru Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. Berdasarkan hasil survei realisasi luas panen padi sepanjang 2025, provinsi Banten secara keseluruhan justru mengalami kenaikan luas panen sebesar 15,49 persen dibandingkan 2024, namun kenaikan tersebut tidak dirasakan merata di seluruh wilayah. Tiga kabupaten/kota dengan produksi padi terendah di Banten pada 2025 tercatat adalah Kota Serang, Kota Cilegon, dan Kota Tangerang, sementara Kota Tangerang bersama Kota Cilegon justru mengalami penurunan produksi padi yang cukup besar di tengah tren peningkatan provinsi. Data ini memperkuat gambaran bahwa Kota Tangerang berada dalam posisi struktural yang semakin rentan sebagai daerah non-produsen pangan, sehingga ketergantungan terhadap pasokan luar daerah bukan kondisi sementara, melainkan kecenderungan jangka panjang yang terus berlanjut. Sebagai respons atas kerentanan tersebut, pemerintah Kota Tangerang mengembangkan mekanisme deteksi dini melalui early warning system berbasis real-time yang memanfaatkan grup komunikasi digital untuk melaporkan perkembangan harga dan kondisi stok di lapangan secara cepat. Pemantauan dilakukan secara terdiferensiasi berdasarkan jenis pasar: pasar tradisional dilakukan oleh Perumda Pasar, sedangkan ritel modern seperti Superindo, Hypermart, Indomaret, dan Alfamart dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pendekatan ini sejalan dengan peran strategis pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam menjaga stabilitas harga melalui operasi pasar murah, pengawasan harga secara rutin, dan kerja sama dengan distributor lokal (Ariandini et al., 2025).

Antisipasi juga diterapkan secara kalenderis, khususnya dalam menghadapi lonjakan permintaan pada momen hari besar keagamaan. Ketika terjadi peningkatan permintaan yang tidak diimbangi ketersediaan barang, pemerintah menerapkan pembatasan pembelian pada komoditas tertentu seperti minyak goreng guna mencegah panic buying, sekaligus mengajukan permintaan operasi pasar kepada pemerintah pusat apabila terjadi kelangkaan yang signifikan. Kapasitas antisipasi ini kini turut diperkuat melalui dua langkah kelembagaan baru. Pertama, Pemerintah Kota Tangerang telah mengoperasikan sistem pemantauan harga resminya sendiri, yaitu Sistem Informasi Harga Pangan Strategis (SIHARTAPASTI), yang menyajikan data harga komoditas secara harian dan dapat diakses publik, melengkapi jaringan pemantauan berjenjang yang selama ini juga berjalan di tingkat provinsi melalui laporan mingguan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten (Pangan, 2025). Kedua, sebagai langkah antisipatif ke depan, pemerintah menetapkan target penguatan cadangan pangan daerah sebesar 597,97 ton pada tahun 2026, seiring perluasan titik pelaksanaan Gampang Sembako Murah dari puluhan lokasi menjadi 52 titik (pemerintah kota tangerang, 2026). Kedua langkah ini menunjukkan bahwa kapabilitas think ahead pemerintah tidak berhenti pada deteksi dini semata, tetapi mulai bergerak ke arah penguatan kapasitas struktural jangka menengah.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

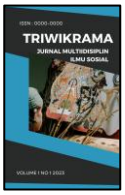

Meski demikian, kapasitas antisipasi Kota Tangerang masih menghadapi keterbatasan struktural. Kerja sama pengadaan pangan yang berjalan selama ini cenderung bersifat business-to-business (B2B) antara distributor dan pelaku usaha, bukan antar pemerintah daerah (government-to-government/G2G). Skema ini bersifat tidak mengikat sehingga tidak ada jaminan alokasi pasokan yang pasti bagi Kota Tangerang, terutama pada momen krusial ketika daerah pemasok pun mengalami peningkatan kebutuhan. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan kemitraan antardaerah menjadi agenda strategis yang mendesak dalam memperkuat kapasitas think ahead pemerintah daerah. Selain antisipasi, keberhasilan Program Gampang Sembako juga sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk melampaui batas-batas organisasi, belajar dari pihak lain, dan membangun aliansi strategis demi mencapai tujuan kebijakan yang tidak bisa diselesaikan sendiri. Bagi Pemerintah Kota Tangerang, hal ini bukan sekadar pilihan administratif, melainkan kebutuhan mendesak mengingat ketergantungan kota yang sangat tinggi terhadap pasokan pangan dari luar daerah. Kolaborasi ini terwujud dalam empat dimensi utama.

Pertama, dari sisi integrasi internal, Dinas Ketahanan Pangan (DKP) menangani sisi hulu melalui pembinaan Kelompok Wanita Tani (KWT), sementara Disperindag bergerak di sisi hilir dengan pemantauan harga dan operasi pasar murah. Satgas Pangan dan TPID berfungsi sebagai instrumen pengawasan terpadu untuk mencegah penimbunan dan lonjakan harga di pasar tradisional. Pendekatan ini mencerminkan collaborative governance lintas perangkat daerah yang menegaskan bahwa stabilisasi pangan tidak bisa bergantung pada satu lembaga saja.

Kedua, dari sisi aliansi dengan lembaga vertikal dan aktor non-pemerintah, kolaborasi dengan Bulog Cabang Tangerang menjadi tulang punggung pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM). Data resmi pemerintah kota mencatat, hingga pertengahan 2025 GPM telah direalisasikan di 37 lokasi dengan melibatkan pemberdayaan 48 kelompok KWT dan Gerakan Halaman Warga (GHW) (pemerintah kota tangerang, 2025) Perumda Pasar menyediakan data stok harian secara real-time, sementara TNI/Polri memastikan kelancaran distribusi dan ketertiban saat intervensi pasar. Sinergi multi-aktor ini mencerminkan wujud nyata think across, bahwa stabilitas pangan perkotaan hanya bisa dicapai melalui keterlibatan berbagai aktor secara simultan.

Ketiga, dalam hal sinergi pembiayaan lintas level, APBD Kota Tangerang menjadi sumber utama operasional rutin, yang diperkuat secara komplementer oleh APBN dan APBD Provinsi Banten dalam bentuk program intervensi yang bersifat dinamis. Meski skema multi-sumber ini meningkatkan fleksibilitas program, wawancara mengungkap adanya kerentanan fiskal: jika salah satu sumber berkurang, intensitas intervensi berpotensi melemah dan daya jangkau program ikut terdampak.

Keempat, terkait ekosistem distribusi berbasis komunitas, program urban farming melalui KWT lebih tepat dipahami sebagai strategi jangka panjang ketahanan pangan, bukan solusi instan pasokan pasar. Di jalur distribusi utama, pemerintah memfasilitasi hubungan B2B antara distributor besar dan pelaku usaha lokal, sambil terus mengevaluasi perlunya model G2G untuk jaminan pasokan yang lebih mengikat. Keterbatasan infrastruktur juga menjadi catatan penting: pemerintah belum memiliki gudang penyimpanan yang representatif dan masih memanfaatkan ruang kantor atau menyewa gudang sementara di kawasan Paskomnas.

Dampak nyata dari kolaborasi lintas sektor ini mulai terlihat pada capaian program di lapangan. Hingga pertengahan 2025, Pemerintah Kota Tangerang telah menyalurkan bantuan sosial kepada 3.747 keluarga penerima manfaat (KPM). Secara keseluruhan, kapabilitas think across dalam Program Gampang Sembako sudah terwujud secara nyata dan mulai menunjukkan hasil, namun masih bersifat adaptif dan belum sepenuhnya terstruktur. Penguatan aspek kelembagaan dan infrastruktur logistik menjadi kebutuhan mendesak agar

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

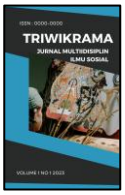

kolaborasi lintas sektor ini dapat berjalan secara lebih berkelanjutan dan efektif ke depannya.

Dalam perspektif dynamic governance, dimensi think again menunjukkan kemampuan pemerintah untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan sesuai dengan keadaan yang berubah di lapangan (Iriani et al., 2025). Proses evaluatif Program Gampang Sembako di Kota Tangerang menunjukkan kesadaran pemerintah terhadap keterbatasan sistem penyimpanan logistik dan distribusi pangan. Hasil wawancara menunjukkan pemerintah daerah belum memiliki gudang penyimpanan khusus yang representatif sehingga penyimpanan bahan pangan masih memanfaatkan kantor maupun sistem sewa gudang sementara. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan logistik pangan belum sepenuhnya terintegrasi dan masih bersifat adaptif terhadap situasi yang ada. Pemerintah menyadari bahwa keberhasilan program subsidi pangan bergantung pada ketersediaan bahan pokok dan infrastruktur logistik yang memadai, sehingga evaluasi dilakukan sebagai refleksi kebijakan untuk meningkatkan distribusi pangan kepada masyarakat.

Selain itu, evaluasi pemerintah tentang keberhasilan program urban farming yang dilakukan oleh KWT juga menunjukkan aspek think again. Hasil wawancara menunjukkan bahwa program tersebut hanya dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga anggota kelompok dan tidak memenuhi kebutuhan pasar yang luas. Pemerintah percaya bahwa urban farming adalah strategi jangka panjang untuk membangun ketahanan pangan berbasis masyarakat, bukan solusi instan untuk masalah stabilitas pangan. Pola kerja sama distribusi pangan yang masih menggunakan skema B2B juga menjadi fokus evaluasi kebijakan, karena dinilai tidak dapat memberikan jaminan pasokan pangan yang stabil, terutama selama periode permintaan tinggi seperti hari raya keagamaan. Oleh karena itu, untuk membuat distribusi pangan lebih terorganisir dan terjamin, diperlukan kerja sama antardaerah yang berbasis G2G. Upaya tersebut mencerminkan adanya proses pembelajaran dan penyesuaian strategi dalam menjaga stabilitas pasokan pangan daerah.

Proses evaluasi dan penyesuaian kebijakan ini juga terjadi pada level perencanaan yang lebih strategis. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangerang baru saja menyusun Kajian Perencanaan Ketahanan Pangan Kota Tangerang Tahun 2025–2029, sebagai respons atas capaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kota Tangerang yang justru menurun dari 86,39 pada 2023 menjadi 85,92 pada 2024, dengan peringkat ke-43 secara nasional (Badan Pangan Nasional, 2024) (Bappeda Kota Tangerang, 2025). Penurunan skor tersebut dinilai mencerminkan fluktuasi ketahanan pangan daerah akibat ketergantungan pada pasokan eksternal dan keterbatasan lahan pertanian produktif. Sebagai tindak lanjut, kajian ini merumuskan peta jalan penguatan ketahanan pangan yang dibagi dalam tiga tahap, yakni penguatan fondasi (2025–2026), akselerasi sistem pangan (2027–2028), dan optimalisasi keberlanjutan (2029), mencakup penguatan rantai pasok antar-daerah, perluasan cakupan Gampang Sembako, serta digitalisasi sistem informasi pangan. Langkah ini menunjukkan bahwa think again pada Program Gampang Sembako tidak hanya terjadi di level operasional-teknis, tetapi juga mulai terinstitusionalisasi dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah.

Sebaliknya, kuota dan anggaran program yang terbatas membuat pelaksanaan subsidi pangan menjadi tantangan bagi pemerintah. Seringkali, kapasitas bantuan yang tersedia tidak sebanding dengan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap bahan pokok bersubsidi. Situasi ini mendorong pemerintah untuk terus mengevaluasi metode distribusi bantuan untuk memastikan bahwa program tetap berjalan efektif dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Dengan demikian, aspek think again dalam Program Gampang Sembako tercermin dalam

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

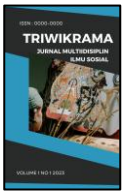

kemampuan pemerintah untuk melakukan evaluasi, refleksi, dan penyesuaian kebijakan berdasarkan tantangan implementasi yang dihadapi.

Jika dibaca kembali melalui fondasi culture, able people, dan agile processes yang telah diuraikan pada bagian Pendahuluan, catatan analitis peneliti menunjukkan bahwa ketiganya di Kota Tangerang belum berkembang secara setara. Culture antisipatif tumbuh cukup kuat—tecermin dari inisiatif SIHARTAPASTI yang dibangun mandiri oleh DKP namun able people dan agile processes yang menopangnya belum diimbangi dengan kewenangan kelembagaan yang mengikat, sehingga hasil antisipasi kerap berhenti pada tahap deteksi tanpa jaminan tindak lanjut. Dengan kata lain, persoalan utama Program Gampang Sembako bukan pada lemahnya inisiatif individu atau unit kerja, melainkan pada kesenjangan antara kapasitas berpikir dinamis yang sudah terbentuk dengan struktur kelembagaan yang belum sepenuhnya mendukungnya.

Menariknya, jika dicermati lebih jauh, Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Tangerang sesungguhnya mengemban dua peran yang cukup berbeda karakternya dalam satu waktu. Di satu sisi, DKP berperan sebagai penggerak sisi hulu, yakni memastikan ketersediaan pasokan pangan melalui program-program yang sifatnya jangka panjang dan baru terlihat hasilnya secara bertahap. Di sisi lain, DKP juga berperan sebagai pengelola sistem informasi harga melalui pengembangan SIHARTAPASTI, yang menuntut respons cepat dan pemutakhiran data harian.

Kedua peran ini menuntut ritme kerja yang berbeda: penguatan sisi hulu bersifat pembangunan kapasitas jangka panjang, sementara pengelolaan SIHARTAPASTI bersifat teknis-administratif yang harus konsisten dan real-time. Perlu digarisbawahi bahwa pengamatan ini merupakan catatan analitis peneliti berdasarkan pembacaan pola kerja di lapangan, bukan temuan eksplisit dari wawancara: belum ada indikasi langsung dari informan bahwa DKP memiliki unit atau sumber daya yang terpisah untuk menjalankan kedua fungsi tersebut secara paralel. Jika benar demikian, terbuka kemungkinan salah satu fungsi terutama penguatan pasokan hulu yang hasilnya baru terlihat dalam jangka Panjang berisiko kurang mendapat prioritas dibanding fungsi pemantauan harga yang tuntutannya lebih mendesak dan terlihat hasilnya sehari-hari. Kondisi ini menjadi catatan penting bagi penguatan kelembagaan DKP ke depan, khususnya dalam memastikan bahwa peran hulu dan peran pemantauan sama-sama mendapat perhatian yang proporsional.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tangerang telah menerapkan ketiga kapabilitas dynamic governance, yaitu think ahead, think again, dan think across, dalam pelaksanaan Program Gampang Sembako, meskipun dengan tingkat kematangan yang berbeda-beda. Kapabilitas think ahead tercermin dari pengembangan early warning system dan Sistem Informasi Harga Pangan Strategis (SIHARTAPASTI, 2026) namun masih terkendala oleh skema kerja sama pengadaan pangan yang bersifat business-to-business dan belum mengikat secara kelembagaan. Kapabilitas think across terwujud melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan DKP, Disperindag, Bulog, Perumda Pasar, dan TNI/Polri, dengan capaian konkret berupa penyaluran bantuan kepada 3.747 keluarga penerima manfaat, meskipun kolaborasi ini masih bersifat adaptif dan belum sepenuhnya terstruktur. Kapabilitas think again tampak dari proses evaluasi berkelanjutan terhadap keterbatasan infrastruktur logistik, capaian program urban farming, serta penyusunan Kajian Perencanaan Ketahanan Pangan Kota Tangerang Tahun 2025–2029 oleh Bappeda sebagai respons atas penurunan skor Indeks Ketahanan Pangan. Secara keseluruhan, keberhasilan jangka panjang Program Gampang Sembako sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah

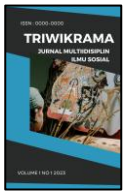

mentransformasikan governance capability yang saat ini masih bersifat reaktif dan adaptif menjadi kapasitas kelembagaan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis. Pertama, penguatan kerja sama antardaerah berbasis government-to-government (G2G) dengan daerah pemasok utama perlu didorong sebagai pengganti skema business-to-business yang selama ini tidak mengikat dan rentan terhadap gangguan pasokan. Kedua, pembangunan gudang penyimpanan pangan yang permanen dan representatif menjadi mendesak, mengingat pemerintah masih bergantung pada ruang kantor dan sewa gudang sementara. Ketiga, integrasi SIHARTAPASTI dengan sistem pemantauan harga tingkat provinsi dan nasional perlu dilakukan agar deteksi dini terhadap gejolak harga menjadi lebih komprehensif dan tidak terfragmentasi. Keempat, diversifikasi sumber pembiayaan melalui skema kemitraan swasta atau CSR perlu dijajaki agar program tidak terlalu bergantung pada APBD semata. Kelima, implementasi peta jalan Kajian Ketahanan Pangan Kota Tangerang 2025–2029 perlu dipercepat dengan indikator capaian yang terukur pada setiap tahapnya. Terakhir, kelembagaan program urban farming berbasis Kelompok Wanita Tani (KWT) perlu diperkuat agar lebih terintegrasi dengan program ketahanan pangan tingkat kota, tanpa mengabaikan keterbatasannya dalam menjangkau kebutuhan pasar yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Ariandini, D., Soerjatisnanta, H., & Firmansyah, A. A. (2025). *Kebijakan Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok*. 1886–1894.

Badan Pangan Nasional. (2024). *Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten/Kota Update Tahun 2024*.

Bappeda Kota Tangerang. (2025). *https://bappeda.tangerangkota.go.id/berita/detail/bappeda-lakukan-kajian-perencanaan-ketahanan-pangan-kota-tangerang-tahun-2025-2029#*.

Fajri, Y. K., Khaerah, N., & Razak, H. F. S. (2020). Journal of Government and Politics Dynamic Governance Dynamic Governance Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, *2*(2), 104–112.

Gouel, C. (2015). *in developing countries Food Price Volatility and Domestic Stabilization Policies in Developing Countries*.

Iriani, A., Prabujaya, S. P., Zubaidah, S., & Endasari, E. (2025). *Pendekatan Thinking Across dalam Dynamic Governance : Strategi Efektif untuk Mewujudkan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) Pendekatan Thinking Across dalam Dynamic Governance menjadi salah satu dan misi GSMP , menjadikan Sumatera Selatan sebagai provi*. *10*(1), 20–41. https://doi.org/10.36982/jpp.v10i1.4687

Kalkuhl, M., & Braun, J. Von. (2016). *Food Price Volatility and Its Implications for Food Security and Policy*.

Nuhfil Hanani, et al. (2023). *Pengantar Ekonomi Pertanian*. https://play.google.com/books/reader?id=mfL4EAAAQBAJ&pg=GBS.PA97&hl=id

Pangan, A. N. K. (2025). *PEMANTAUAN STABILITAS PASOKAN DAN HARGA PANGAN*. *12*, 1–11.

pemerintah kota tangerang. (2025). *https://ppid.tangerangkota.go.id/artikel/detail/52159/warga-akui-manfaat-program-gampang-sembako-solusi-nyata-turunkan-stunting-di-kota-tangerang*.

Rantau, M. I., Putra, H. P., & Hilman, H. (2024). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) (Studi Kasus : Perlindungan Lahan Pertanian Pangan di Provinsi Banten). *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, *5*(1), 17–28. https://doi.org/10.46730/japs.v5i1.130

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

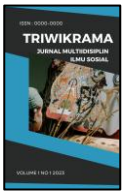

SIHARTAPASTI. (2026). *Sistem Informasi Harga Pangan Strategis Kota Tangerang (SIHARTAPASTI). Diakses dari https://sihartapasti.tangerangkota.go.id/*.

Statistik, B. P., & Banten, P. (2026). *Luas Panen dan Produksi Padi di Provinsi Banten 2025 (Angka Tetap)*. *2025*(09), 1–16.